

# ANALISIS INDIKATOR LOGISTIK PANGAN (BERAS) PROVINSI JAWA BARAT 2017



**ANALISIS INDIKATOR  
LOGISTIK PANGAN (BERAS)  
PROVINSI JAWA BARAT  
2017**





**ANALISIS INDIKATOR LOGISTIK PANGAN (BERAS)  
PROVINSI JAWA BARAT 2017**

Katalog : 8299002.32  
No. Publikasi : 32560.1801

Ukuran Buku : 18 cm x 26 cm  
Jumlah Halaman : xii + 54 halaman

Naskah :  
Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Gambar Kulit :  
Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Ilustrasi Foto :  
Padi dan Beras ([www.thambiluvil.info](http://www.thambiluvil.info))

Diterbitkan Oleh :  
© Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Dicetak Oleh :  
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

*Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan,  
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan  
komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik*

**ANALISIS INDIKATOR LOGISTIK PANGAN (BERAS)  
PROVINSI JAWA BARAT 2017**

**Tim Penyusun :**

Penanggung Jawab Umum : Dody Herlando

Penanggung Jawab Teknis : M. Unggul Sampurna

Penulis dan Pengolah Data : Vira Wahyuningrum

Penyunting / Editor : Dewi Mulyahati  
Anik Triani

<https://jabar.pps.go.id>

## KATA PENGANTAR

Publikasi ini menampilkan beberapa indikator yang berkaitan dengan logistik pangan khususnya beras di Provinsi Jawa Barat tahun 2017. Analisis dalam publikasi ini memuat ulasan ringkas, indikator dan data-data pendukung meliputi produksi, distribusi, harga maupun konsumsi beras.

Data yang disajikan diperoleh dari hasil sensus dan survei yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat. Informasi yang disajikan dalam publikasi ini diharapkan dapat digunakan untuk memonitor dinamika kondisi logistik pangan di Provinsi Jawa Barat dan dapat menjadi basis bagi perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian publikasi ini diucapkan terima kasih. Saran dan kritik sangat diharapkan guna perbaikan pada penerbitan publikasi selanjutnya.

Bandung, Mei 2018  
BPS Provinsi Jawa Barat  
Kepala,



Dody Herlando



## ***EXECUTIVE SUMMARY***

Komoditi beras dan ketersediaannya merupakan bahasan penting yang menjadi sorotan masyarakat. Ketersediaan beras sebagai makanan pokok penduduk Indonesia, khususnya Jawa Barat memerlukan perhatian dan penanganan oleh pemerintah. Gambaran kondisi logistik pangan di Jawa Barat tercermin dari indikator-indikator statistik terkait bidang pangan. Ketahanan pangan dapat dilihat dari data produksi padi/beras mencakup luas lahan dan produktivitas tanaman padi. Ketersediaan pangan meliputi hasil produksi dalam negeri maupun impor dari luar negeri bila diperlukan agar kebutuhan pangan tercukupi. Kebutuhan pangan tergambar dari jumlah penduduk, perubahan harga dan pola konsumsi penduduk. Indikator-indikator tersebut disajikan dalam publikasi ini untuk melihat informasi ringkas dan analisis keterkaitan antar indikator serta dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, pengawasan maupun evaluasi program pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat.





## DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	v
<i>Executive Summary</i>	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Gambar	xi
1. PENDAHULUAN	1
2. LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK DAN KEPADATAN PENDUDUK	4
3. LUAS LAHAN	8
4. PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI	11
5. INFLASI	15
6. NILAI TUKAR PETANI	18
7. HARGA	22
8. POLA KONSUMSI	26
9. EKSPOR IMPOR	29
10. PENUTUP	32
LAMPIRAN	35
DAFTAR ISTILAH	53



## DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1. Persentase Luas Wilayah dan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2017	4
Gambar 2. Laju Pertumbuhan Penduduk (persen) dan Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> ) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2017	5
Gambar 3. Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk (persen) dan Jumlah Penduduk (Juta Jiwa) Jawa Barat, 2011-2017	6
Gambar 4. Luas Baku Lahan yang Ditanami Padi Menurut Jenis Lahan di Jawa Barat (Hektar), 2012-2016	9
Gambar 5. Luas Panen Tanaman Padi dan Perkembangannya di Jawa Barat, 2012-2016	10
Gambar 6. Persentase Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2016	11
Gambar 7. Persentase Perkembangan Produktivitas dan Produksi Padi per Tahun di Jawa Barat, 2012-2016	12
Gambar 8. Produksi Padi dan Produksi Setara Beras di Jawa Barat per Tahun, 2012- 2016 (Juta Ton)	13
Gambar 9. Perkembangan Inflasi Gabungan 7 Kota di Jawa Barat Secara Umum dan Komoditi Beras per Bulan, 2017 (Persen)	16
Gambar 10. Perkembangan Inflasi Gabungan 7 Kota di Jawa Barat Secara Umum dan Komoditi Beras per Bulan, 2017 (Persen)	16
Gambar 11. Andil Inflasi Komoditi Beras dan Inflasi Umum Gabungan 7 Kota di Jawa Barat, September - Desember 2017 (Persen)	17
Gambar 12. NTP Umum dan NTP Subsektor Tanaman Pangan per Bulan di Jawa Barat, 2017	18
Gambar 13. Persentase Perubahan NTP Umum dan NTP Subsektor Tanaman Pangan per Bulan di Jawa Barat, 2017	19

	Hal.
Gambar 14. NTUP Umum dan NTUP Subsektor Tanaman Pangan per Bulan di Jawa Barat, 2017	20
Gambar 15. Persentase Perubahan NTUP Umum dan NTUP Tanaman Pangan per Bulan di Jawa Barat, 2017	21
Gambar 16. Persentase Perubahan Rata-rata Harga Gabah per bulan di Tingkat Petani Menurut Kualitas di Jawa Barat, 2017	22
Gambar 17. Persentase Perubahan Rata-rata Harga Gabah per bulan di Tingkat Penggilingan Menurut Kualitas di Jawa Barat, 2017	23
Gambar 18. Persentase Perubahan Harga Beras per Bulan di Tingkat Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas Beras di Jawa Barat, 2017	24
Gambar 19. Share Komoditi Makanan dan Non Makanan pada Garis Kemiskinan Menurut Klasifikasi Daerah di Jawa Barat, September 2017 (Persen)	26
Gambar 20. Rata-rata Konsumsi Penduduk per Kapita Seminggu Menurut Beberapa Bahan Makanan di Jawa Barat, 2017	27
Gambar 21. Volume Ekspor Beras Jawa Barat Menurut Bulan dan Negara Tujuan Ekspor Selama Tahun 2017 (Ton)	30
Gambar 22. Persentase Nilai Ekspor Migas – Non Migas dan Ekspor Beras Jawa Barat, 2017	30
Gambar 23. Persentase Nilai Impor Migas dan Non Migas Jawa Barat, 2017	31

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, yaitu lebih dari 18 persen total penduduk Indonesia. Laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat sekitar 1 hingga 2 persen dan cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Namun secara kuantitas jumlah penduduk terus bertambah dari tahun ke tahun. Salah satu hal penting terkait jumlah penduduk adalah ketersediaan pangan. Masalah ketersediaan pangan mencakup produksi, distribusi maupun konsumsi logistik pangan. Pemerintah baik di pusat maupun daerah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi program ketahanan pangan dan ketersediaan logistik pangan.

Lembaga pemerintah yang ditunjuk untuk menangani logistik pangan adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog). Perum Bulog mengemban tugas publik dari pemerintah antara lain melakukan kegiatan menjaga Harga Dasar Pembelian gabah, stabilisasi harga, menyalurkan beras untuk orang miskin (Raskin) dan pengelolaan stok pangan. Berdasarkan Keppres No 19 tahun 1998, tugas pokok Bulog dibatasi hanya untuk menangani komoditas beras, sedangkan komoditas lain yang dikelola selama ini dilepaskan ke mekanisme pasar ([www.bulog.co.id](http://www.bulog.co.id)).

Beras merupakan makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Jawa Barat. Konsumsi beras semakin meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Adanya ketergantungan masyarakat yang sangat tinggi terhadap beras dapat menjadi masalah jika ketersediaan beras sudah tidak dapat tercukupi. Keadaan ini dapat menjadi kendala dan mengganggu ketahanan pangan daerah dan nasional.

Untuk mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan diperlukan indikator-indikator sebagai dasar perencanaan, pengawasan dan evaluasi program. Indikator-indikator tersebut akan banyak memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam membuat perencanaan atau kebijakan strategis dalam rangka menjaga ketersediaan logistik pangan bagi masyarakat, khususnya komoditi beras. BPS sebagai lembaga pemerintah dengan visi menjadi pelopor data statistik terpercaya untuk semua, memiliki tugas menyediakan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data dan informasi statistik sebagai penunjang program pemerintah dan pengguna informasi khususnya di bidang pangan (komoditi beras) dikumpulkan dari berbagai kegiatan sensus dan survei.

Publikasi ini menyajikan beberapa indikator terbaru terkait dengan logistik pangan di Jawa Barat meliputi produksi, distribusi dan konsumsi beras. Dalam publikasi ini disajikan karakteristik dan informasi yang mendukung secara lebih rinci untuk level Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat.

### **1.2. Tujuan**

Tujuan penulisan publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran ringkas tentang kondisi logistik pangan khususnya beras di Jawa Barat pada tahun 2017 berdasarkan data yang dihimpun dari sensus dan survei serta publikasi yang berkaitan.

### **1.3. Metodologi**

Pengumpulan data diambil dari beberapa kegiatan sensus dan survei yang dilakukan BPS yang sebagian besar telah dipublikasikan maupun dirilis secara bulanan dan triwulanan yang disajikan dalam

bentuk Berita Resmi Statistik (BRS) diantaranya mengenai Inflasi, Nilai Tukar Petani, dan Ekspor-Import. Beberapa data pendukung diolah kembali menyesuaikan dengan tujuan penulisan publikasi dan bersumber dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat.

#### **1.4. Sumber Data**

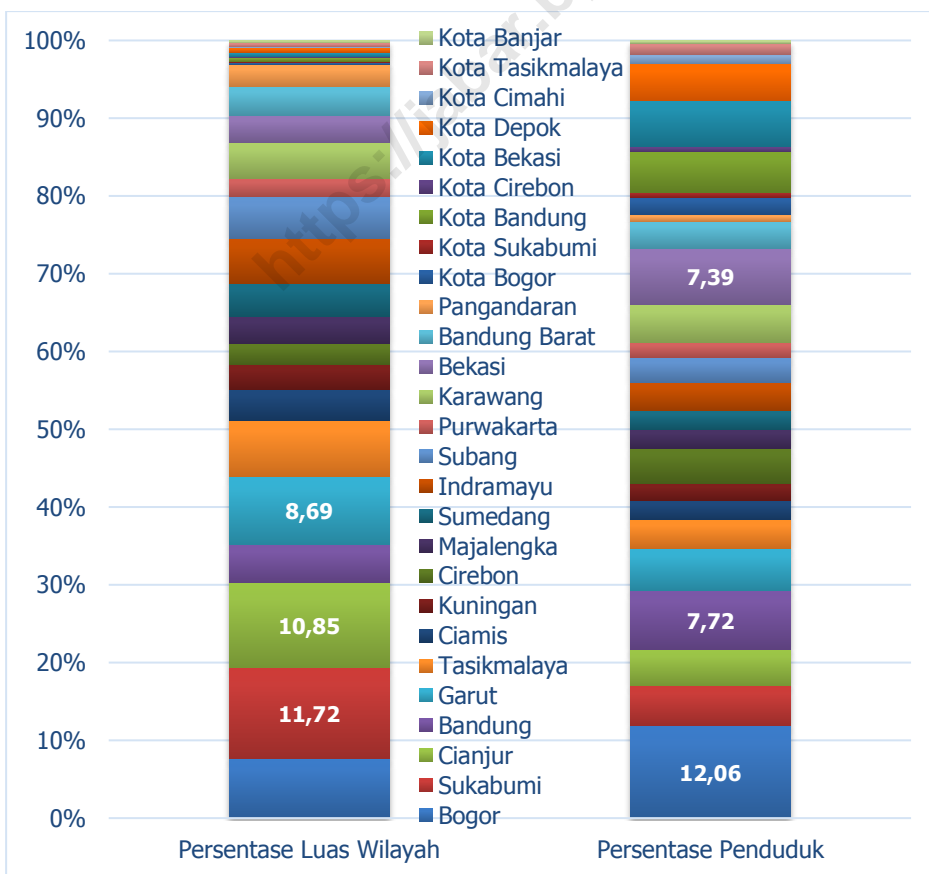
Sumber data yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini berasal dari hasil pengumpulan data sensus dan survei, publikasi dan data yang digunakan dalam penyusunan Berita Resmi Statistik bulanan selama tahun 2017 oleh Badan Pusat Statistik. Beberapa indikator disertakan secara *series* membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk melihat perkembangannya. Data mengenai luas panen tanaman padi untuk tahun 2016 dan 2017 bersumber dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat berdasarkan Statistik Pertanian Padi (SP-Padi) yang dilakukan secara bulanan.



## 2. LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK DAN KEPADATAN PENDUDUK

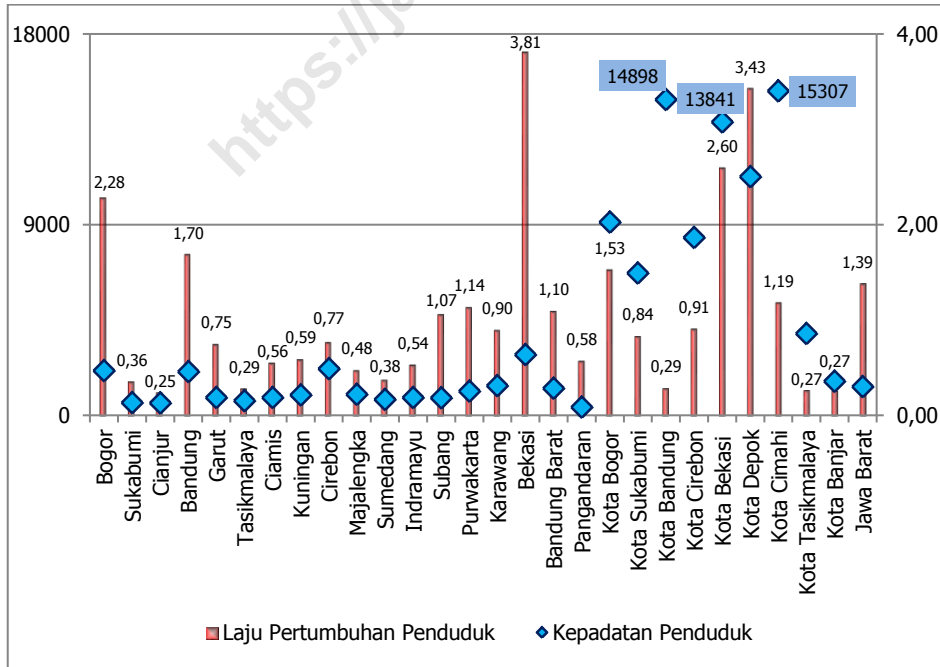
Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah 35.377,76 Km<sup>2</sup> merupakan provinsi terluas kedua di Pulau Jawa setelah Provinsi Jawa Timur. Secara nasional, persentase luas wilayah Provinsi Jawa Barat berada di urutan dua puluh. Jawa Barat terdiri dari 18 wilayah Kabupaten dan 9 Kota. Tiga kabupaten/kota terluas di Jawa Barat yaitu Kabupaten Sukabumi (41.45,70 Km<sup>2</sup>), Kabupaten Cianjur (3.840,16 Km<sup>2</sup>) dan Kabupaten Garut (3.074,07 Km<sup>2</sup>).

Gambar 1. Persentase Luas Wilayah dan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2017



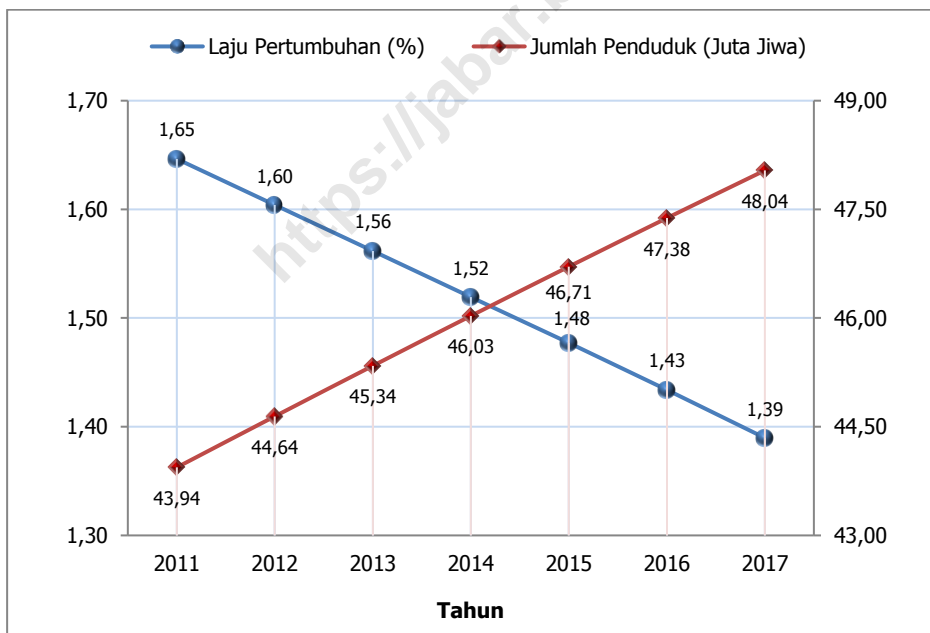
Jumlah penduduk Jawa Barat tahun 2017 hasil proyeksi penduduk sebanyak 48.037.827 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kabupaten Bogor yaitu 5,71 juta jiwa (12,06 persen) , Kabupaten Bandung sebanyak 3,66 juta jiwa (7,72 persen) dan Kabupaten Bekasi sebanyak 3,50 juta jiwa (7,39 persen). Laju Pertumbuhan penduduk Jawa Barat tahun 2017 sebesar 1,39 persen, hal ini menunjukkan terjadi peningkatan jumlah penduduk sebanyak 0,66 juta jiwa jika dibandingkan tahun 2016. Kabupaten/Kota dengan laju pertumbuhan penduduk paling tinggi adalah Kabupaten Bekasi (3,81 persen), Kota Depok (3,43 persen) dan Kota Bekasi (2,60 persen), sementara yang paling rendah adalah di Kabupaten Cianjur (0,25 persen).

Gambar 2. Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen) dan Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km<sup>2</sup>) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2017



Berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk, didapatkan indikator kepadatan penduduk yang menggambarkan rata-rata jumlah penduduk tiap 1 Km<sup>2</sup> luas wilayah. Kepadatan penduduk antar kabupaten/kota di Jawa Barat kurang merata. Hal ini berkaitan dengan kemampuan wilayah dalam mendukung kehidupan penduduknya. Kepadatan penduduk Provinsi Jawa Barat adalah 1.358 jiwa/Km<sup>2</sup>, sementara tiga kabupaten/kota terpadat adalah Kota Cimahi (15.307 jiwa/Km<sup>2</sup>), Kota Bandung (14.898 jiwa/Km<sup>2</sup>) dan Kota Bekasi (13.841 jiwa/Km<sup>2</sup>).

Gambar 3. Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen) dan Jumlah Penduduk (Juta Jiwa) Jawa Barat, 2011-2017



Laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat periode 2011 hingga 2017 menunjukkan perlambatan setiap tahunnya. Namun, secara kuantitas jumlah penduduk Jawa Barat masih mengalami peningkatan

setiap tahun. Perubahan struktur dan jumlah penduduk akan sangat berpengaruh terhadap pola konsumsi dan jumlah kebutuhan pangan penduduk. Satu hal yang perlu diantisipasi dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan produksi pangan. Bila pertumbuhan penduduk lebih pesat dibandingkan produksi maka akan timbul kelangkaan pangan.

<https://jabar.bps.go.id>

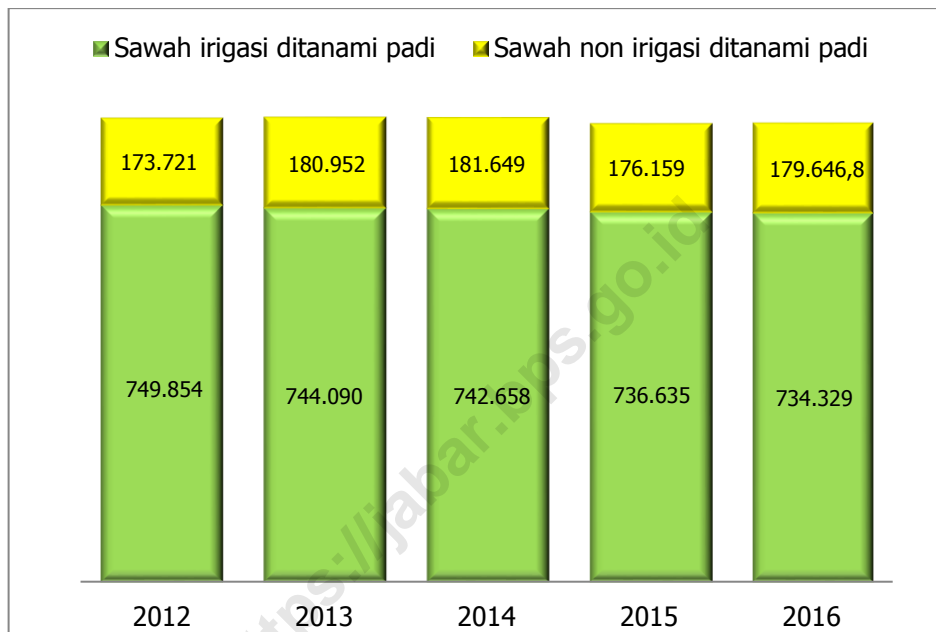
### 3. LUAS LAHAN

Data luas lahan dan luas panen yang digunakan BPS dalam menghitung produksi tanaman pangan merupakan data yang dikumpulkan Dinas Pertanian Tanaman Pangan melalui Survei Pertanian Tanaman Pangan. Data luas lahan ini dikumpulkan dengan menggunakan metode konvensional, yaitu perkiraan luas berdasarkan informasi penggunaan pupuk dan air (irigasi), laporan petani dan metode *eye estimate*. Metode *eye estimate* merupakan metode untuk memperkirakan luas berdasarkan pandangan hamparan sehingga cenderung dinilai kurang akurat dan membutuhkan waktu relatif lama. Data luas panen menjadi dasar dalam menghitung produksi, yaitu mengalikan luas panen dengan angka produktivitas. Bila luas panen tidak akurat maka akan sangat mempengaruhi hasil penghitungan produksi tanaman pangan.

Mendapatkan data luas panen yang akurat memiliki beberapa kendala, terutama dalam penentuan metode pengumpulannya yang berkaitan dengan kemutakhiran, waktu dan biaya. Penggunaan sistem navigasi GPS (*Global Positioning System*) dipandang sebagai satu metode ilmiah dan menghasilkan data luas panen yang lebih akurat. Untuk itu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bekerja sama dengan BPS mengembangkan metode baru dengan memanfaatkan teknologi GPS yaitu metode Kerangka Sampel Area (KSA) yang dilaksanakan pada awal tahun 2018. Sementara itu, data mengenai luas lahan dan luas panen tahun 2017 yang bersumber dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan belum dapat dipublikasikan karena penetapan Angka Tetap (ATAP) masih dievaluasi kembali. Oleh sebab itu pada pembahasan luas lahan dan produksi padi pada publikasi ini menggunakan indikator tahun 2016. Sebagai gambaran luas panen dan produksi padi di tahun 2017 karena angka tetap belum dapat

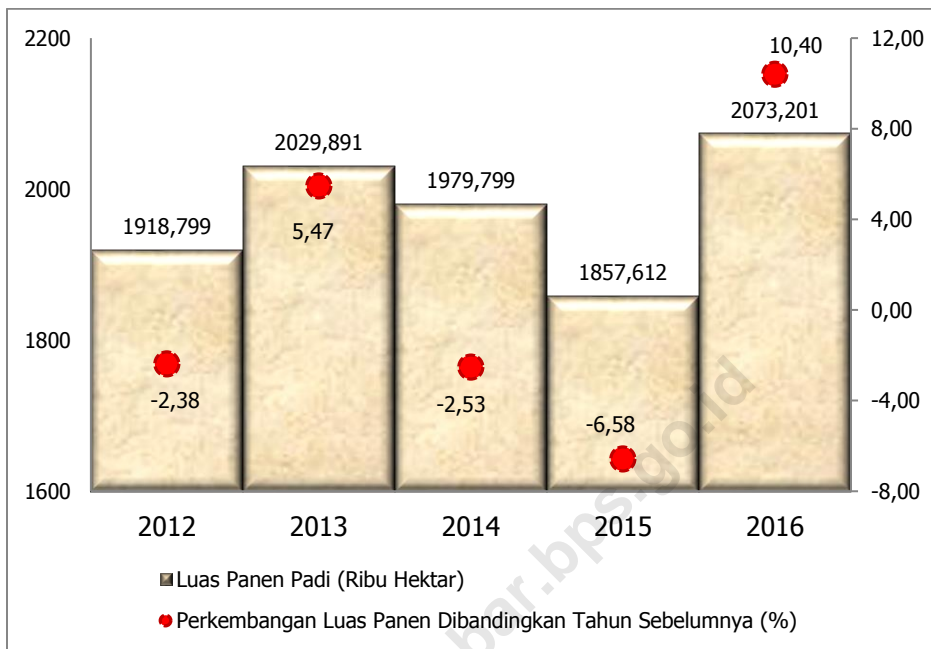
dipublikasikan, perkembangannya akan ditunjukkan dalam perkiraan persentase perubahan dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar 4. Luas Baku Lahan yang Ditanami Padi Menurut Jenis Lahan di Jawa Barat (Hektar), 2012-2016



Luas lahan sawah di Jawa Barat merupakan yang terbesar ketiga di Indonesia setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah yaitu sekitar 11 persen dari luas lahan sawah nasional. Luas baku lahan sawah di Jawa Barat yang ditanami padi pada tahun 2016 seluas 913,98 ribu hektar meliputi 734,33 ribu hektar sawah irigasi dan 179,65 ribu hektar sawah non irigasi. Dalam periode tahun 2012-2016, luas baku lahan yang ditanami padi berupa sawah irigasi berkurang tiap tahun. Sebaliknya luas baku lahan sawah non irigasi yang ditanami padi mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2015. Secara total, dari tahun ke tahun luas lahan baku yang ditanami padi tidak menunjukkan perubahan yang signifikan.

Gambar 5. Luas Panen Tanaman Padi dan Perkembangannya di Jawa Barat, 2012-2016

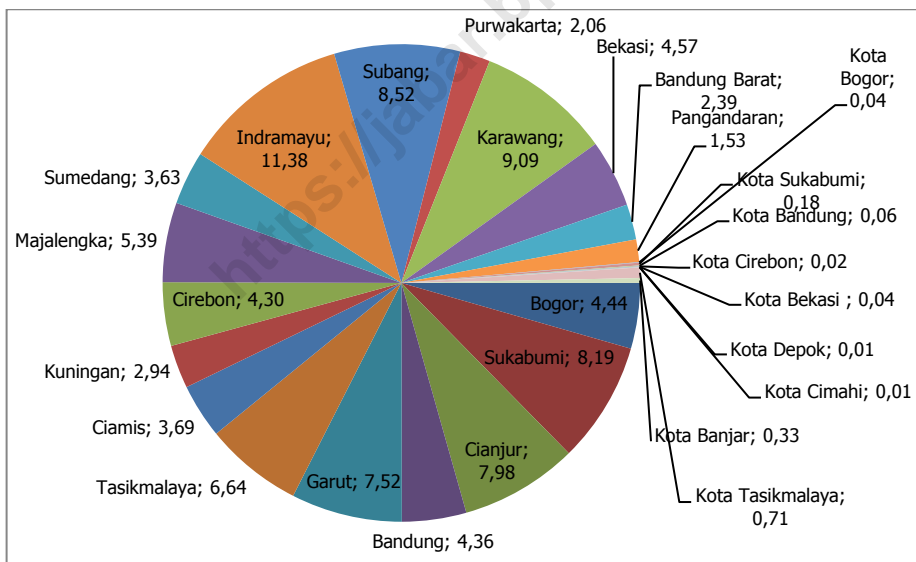


Berdasarkan data Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Barat, luas panen tanaman padi tahun 2016 mencapai 2.073,20 ribu hektar dan mengalami peningkatan hingga 10,40 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Luas lahan panen selama 2013-2015 menunjukkan *trend* menurun setiap tahunnya. Sementara itu untuk tahun 2017, perkiraan luas panen tanaman padi meningkat sekitar 2 persen dibandingkan tahun 2016 (Angka Tetap 2017 belum dapat dipublikasikan).

#### 4. PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI

Sasaran pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tercapainya swasembada pangan, khususnya beras sebagai makanan pokok penduduk. Ketersediaan pangan suatu daerah dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu produksi daerah, pemasokan pangan dan cadangan pangan. Di Jawa Barat, tiga kabupaten penghasil padi terbesar adalah Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang. Ketiga kabupaten ini memberikan kontribusi hampir 30 persen dari seluruh produksi padi yang dihasilkan di Jawa Barat.

Gambar 6. Persentase Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2016



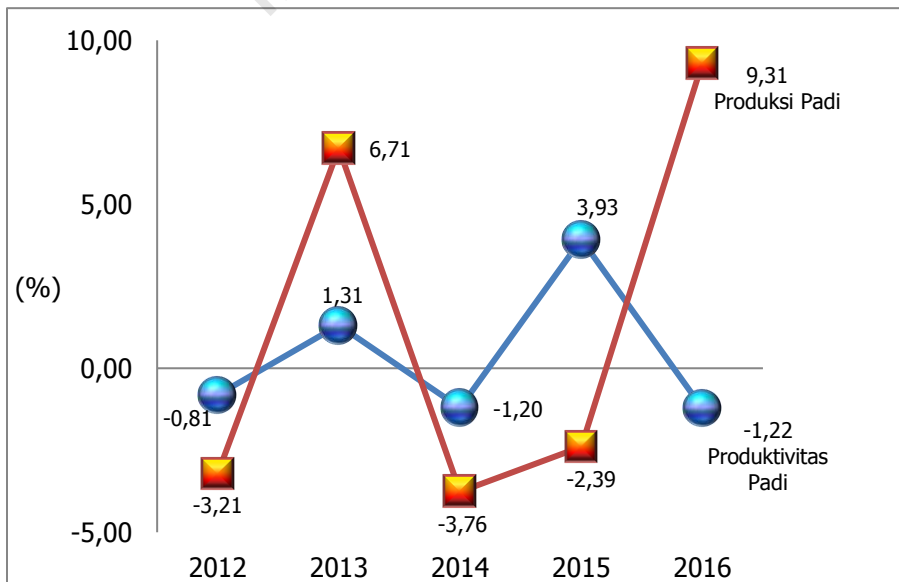
Produksi padi dihitung dari perkalian antara luas panen dan produktivitas tanaman padi. BPS mengitung produktivitas padi berdasarkan hasil survei Ubinan. Ubinan adalah survei yang bertujuan untuk mengetahui produktivitas (hasil per hektar) tanaman setiap *subround* (periode empat bulanan).



Selanjutnya untuk mendapatkan angka produksi beras digunakan metode konversi dari padi ke beras. Berdasarkan hasil Survei Susut Panen dan Pasca Panen Gabah/Beras yang dilakukan oleh BPS dan Kementerian Pertanian tahun 2005 hingga 2007 yang diintegrasikan, didapatkan angka konversi dari Gabah Kering Panen (GKP) ke Gabah Kering Giling (GKG) dan dari GKG ke Beras.

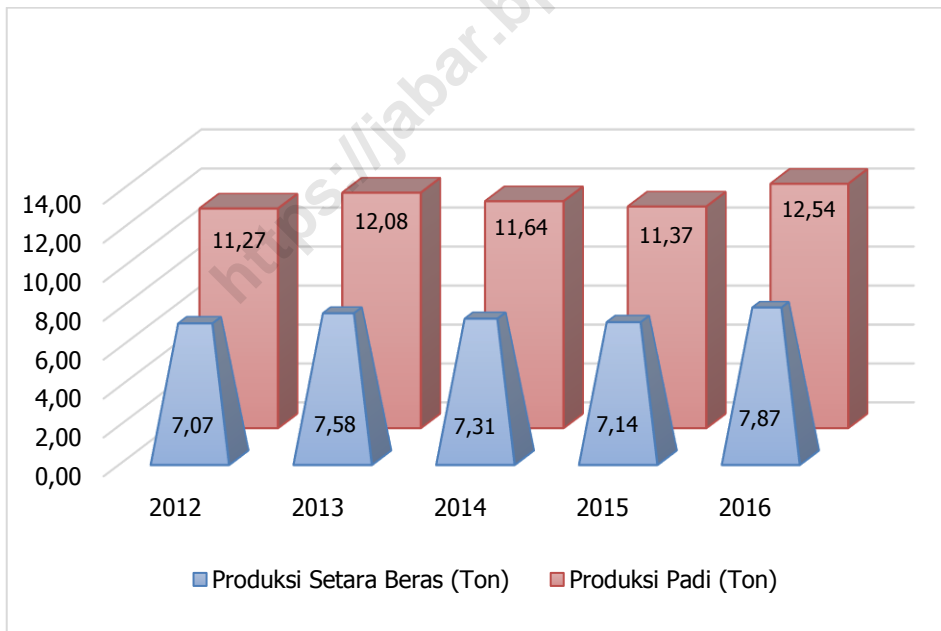
Angka konversi GKP ke GKG adalah 86,02 persen, artinya pada pengeringan 1 kuintal GKP akan menghasilkan 86,02 kg GKG. Pengurangan bobot dari proses pengeringan sebesar 13,98 persen dikarenakan 10,71 persen pengurangan kadar air (susut air) dan 3,27 persen kehilangan fisik. Angka konversi GKG ke beras sebesar 62,74 persen, berasal dari rendemen laboratorium sebesar 65,99 persen dikurangi susut penggilingan 3,25 persen (Pusdatin Kementan). Angka konversi 62,74 ini digunakan untuk memperkirakan beras yang diperoleh dari penggilingan GKG dan juga menghitung susut penggilingan.

Gambar 7. Persentase Perkembangan Produktivitas dan Produksi Padi per Tahun di Jawa Barat, 2012-2016



Produksi padi 2016 meningkat pesat hingga 9,31 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 11,37 juta ton menjadi 12,54 juta ton. Meskipun produktivitasnya sedikit menurun dari 61,22 kuintal/hektar menjadi 60,49 kuintal/hektar di tahun 2016, namun luas panen yang tumbuh cukup tinggi berpengaruh terhadap produksi padi yang dihasilkan. Perkembangan produktivitas tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 menunjukkan penurunan sekitar 2 hingga hampir 4 persen. Sedangkan produksi padi 2017 Jawa Barat mengalami perubahan yang tidak terlalu signifikan (kurang dari satu persen).

Gambar 8. Produksi Padi dan Produksi Setara Beras per Tahun di Jawa Barat, 2012-2016 (Juta Ton)



Produksi setara beras yang dikonversi dari produksi padi Jawa Barat tahun 2016 sebesar 7,87 juta ton. Angka produksi beras ini berasal dari penghitungan produksi padi 12,54 juta ton dikalikan angka konversi GKG ke beras. Produksi beras tahun 2017 juga mendekati

besaran angka tahun 2016, karena produksi padi pada dua tahun terakhir tidak berbeda jauh. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan strategi peningkatan produksi pertanian terutama beras agar terus meningkat atau minimal stabil produksinya di tahun-tahun mendatang.

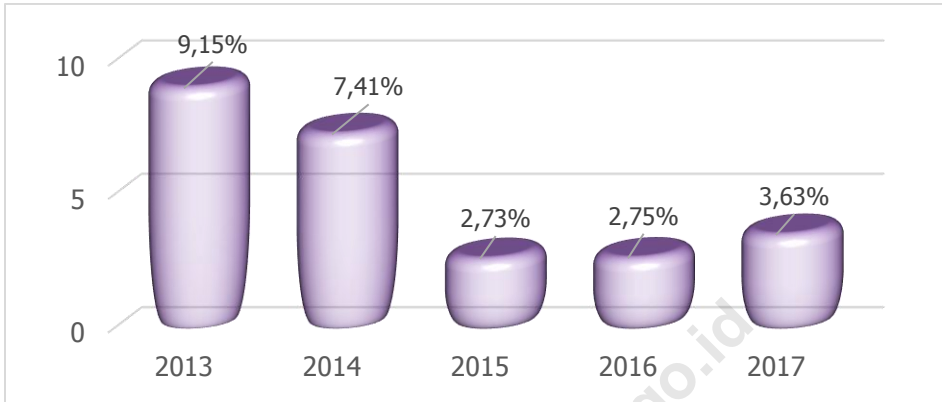
<https://jabar.bps.go.id>

## 5. INFLASI

Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan indeks harga. Penghitungan inflasi juga melalui proses yang cukup panjang dan rumit. Selain mengumpulkan data harga pasar dari berbagai komoditi, penghitungan inflasi juga melibatkan penghitungan diagram timbang dari Survei Biaya Hidup (SBH). Hasil SBH berupa rata-rata pengeluaran responden untuk tiap komoditi menjadi angka diagram timbang yang mengukur besar kecilnya suatu komoditi mempengaruhi inflasi. Sebagai contoh, beras merupakan komoditi dengan angka diagram timbang yang besar karena dikonsumsi oleh hampir seluruh penduduk, maka sedikit saja perubahan harga beras akan sangat mempengaruhi tingkat inflasi.

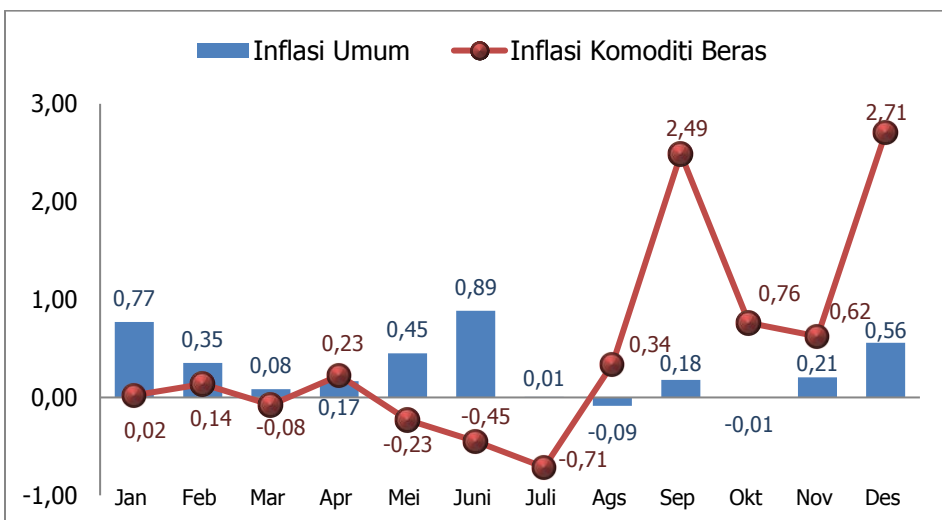
Keparahan inflasi digolongkan menjadi 4, yaitu inflasi ringan (<10 persen per tahun), inflasi sedang (10-30 persen per tahun), inflasi berat (30-100persen per tahun) dan hiperinflasi (>100p ersen per tahun). Bila inflasi yang terjadi masih dalam batas inflasi ringan, akan dapat mendorong perekonomian menjadi lebih baik, hal ini akan meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Namun bila terjadi keparahan inflasi atau bahkan tidak terkendali (hiperinflasi) maka akan berdampak negatif dan menyebabkan keterpurukan perekonomian. Untuk mengendalikan inflasi di tingkat daerah terdapat TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) yang berperan dalam menjaga stabilitas harga di daerah.

Gambar 9. Perkembangan Inflasi Umum Tahunan Gabungan 7 Kota di Jawa Barat, 2013- 2017 (Persen)



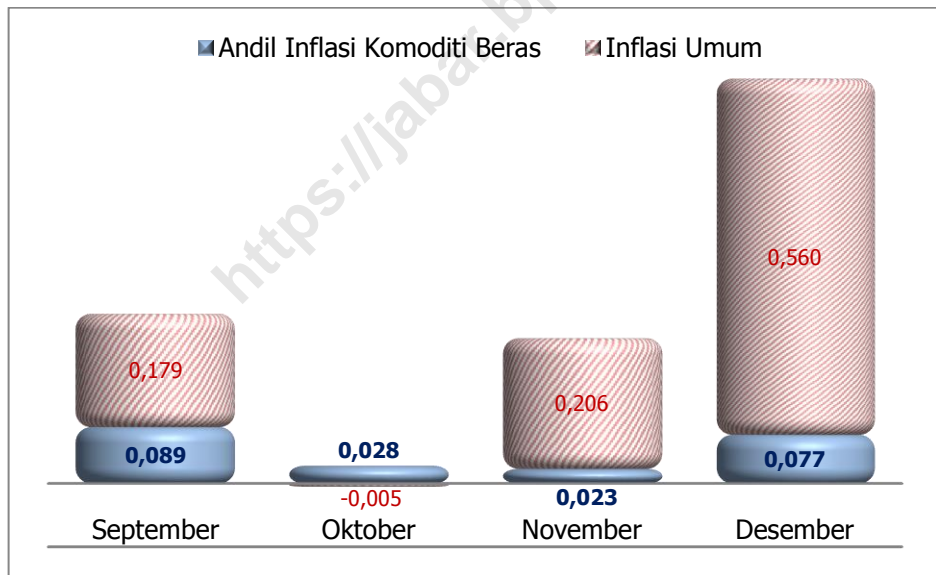
Inflasi Umum gabungan 7 kota di Jawa Barat tahun 2017 sebesar 3,63 persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi 2 tahun sebelumnya yang di bawah tiga persen. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, inflasi umum Jawa Barat jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2014 dan 2015.

Gambar 10. Perkembangan Inflasi Gabungan 7 Kota di Jawa Barat Secara Umum dan Komoditi Beras per Bulan, 2017 (Persen)



Sementara dari penjumlahan inflasi bulanan untuk komoditi beras di Jawa Barat selama tahun 2017 mencapai 5,84 persen. Inflasi beras tertinggi terjadi pada bulan Juni 2017 yaitu mencapai 0.89 persen. Terjadinya lonjakan tersebut salah satunya karena memasuki periode/siklus bulan Ramadhan dan Lebaran 1438 H, dimana setiap tahunnya inflasi meningkat terutama disebabkan harga pangan. Inflasi dapat terjadi disebabkan kelebihan permintaan, perubahan penawaran terkait harga dan kuantitas barang, serta ekspektasi masyarakat terhadap inflasi.

Gambar 11. Andil Inflasi Komoditi Beras dan Inflasi Umum Gabungan 7 Kota di Jawa Barat, September - Desember 2017 (Persen)



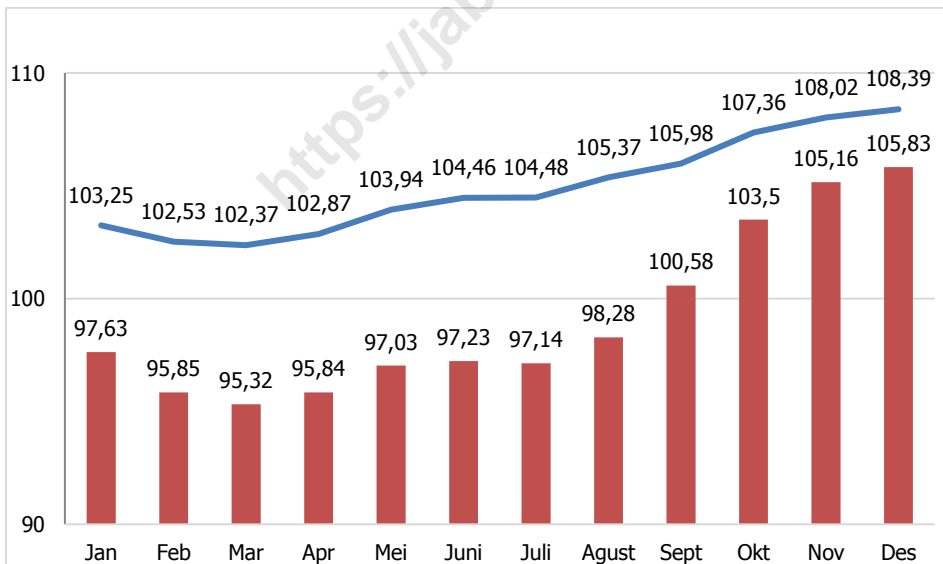
Pada empat bulan terakhir di tahun 2017, Beras termasuk lima besar komoditi yang memiliki andil dalam mempengaruhi inflasi/deflasi di Jawa Barat. Inflasi umum September 2017 sebesar 0,179 persen dengan andil komoditi beras sebesar 0,089 persen.



## 6. NILAI TUKAR PETANI

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan pendekatan (*proxy*) yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. NTP membandingkan fluktuasi harga komoditas pertanian dengan fluktuasi harga yang dibayar petani untuk seluruh pengeluaran petani. Dibandingkan enam provinsi di Pulau Jawa, NTP Jawa Barat merupakan yang tertinggi. NTP secara keseluruhan yang mencakup sektor pertanian meliputi 5 subsektor yaitu subsektor Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, Peternakan dan Perikanan. Pada publikasi ini dibahas perkembangan NTP umum dan Subsektor tanaman pangan saja dimana komoditas padi termasuk di dalamnya.

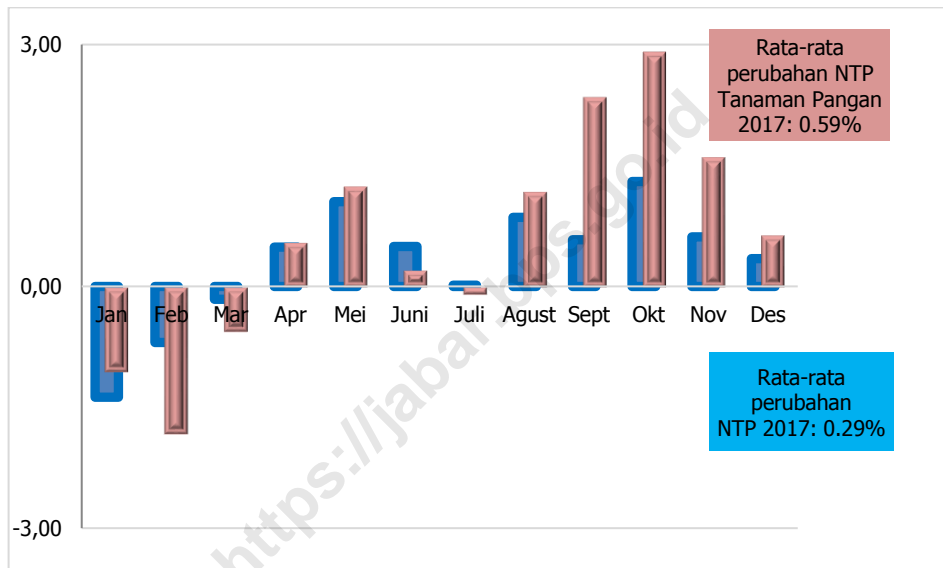
Gambar 12. NTP Umum dan NTP Subsektor Tanaman Pangan per Bulan di Jawa Barat, 2017



Rata-rata NTP Jawa Barat tahun 2017 adalah 104,92, sedangkan untuk NTP Tanaman Pangan sebesar 99,12. Selama tahun 2017, NTP tertinggi terjadi di bulan Desember yaitu sebesar 108,39 dan

terendah pada bulan Maret yaitu 102,37. Demikian pula NTP khusus tanaman pangan mencapai nilai tertinggi pada bulan Desember yaitu 105,83. Secara umum angka NTP subsektor tanaman pangan selama 2017 berada di bawah angka NTP total dengan *trend* yang sama.

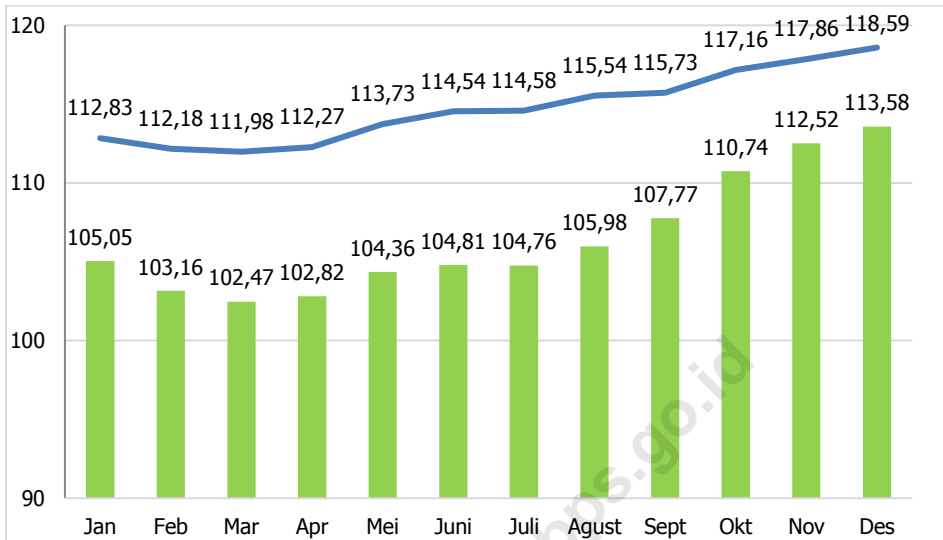
Gambar 13. Persentase Perubahan NTP Umum dan NTP Subsektor Tanaman Pangan per Bulan di Jawa Barat, 2017



Awal tahun 2017 hingga bulan Mei, perubahan NTP menunjukkan *trend* yang positif. Perubahan NTP tanaman pangan menunjukkan *trend* yang sama dengan NTP umum, kecuali pada bulan Februari dan September. Perubahan NTP per bulan sepanjang 2017 menunjukkan peningkatan yang signifikan sebesar 1,30 persen pada bulan Oktober, namun mengalami penurunan hingga bulan Desember. Pada subsektor tanaman pangan peningkatan tertinggi NTP juga terjadi pada bulan Oktober sebesar 2,90 persen. Rata-rata perubahan NTP per bulan pada tahun 2017 sebesar 0,29 persen, sedangkan pada subsektor tanaman pangan sebesar 0,59 persen.



Gambar 14. NTUP Umum dan NTUP Subsektor Tanaman Pangan per Bulan di Jawa Barat, 2017

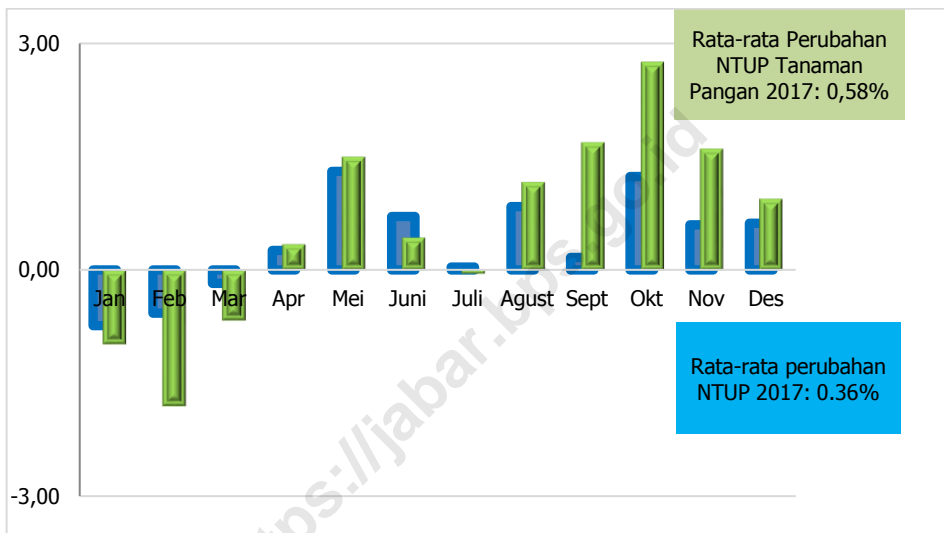


Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) merupakan perbandingan atau rasio antara indeks harga yang diterima petani (IT) dengan indeks harga yang dibayar petani khusus untuk kelompok biaya produksi. Bila NTP membandingkan seluruh kebutuhan petani baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan biaya produksi, NTUP membandingkan kebutuhan usaha tani dengan biaya produksi.

Sama seperti perkembangan NTP, NTUP pada awal tahun 2017 juga menunjukkan *trend* positif yang signifikan. Perkembangan NTUP bulan Mei sebesar 1,30 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan merupakan perubahan tertinggi sepanjang 2017. Rata-rata perubahan NTUP per bulan tahun 2017 sebesar 0,36 persen, sedangkan pada subsektor tanaman pangan sebesar 0,58 persen. Perkembangan NTUP Tanaman Pangan menunjukkan *trend* yang berlawanan dengan NTUP umum pada Februari, September dan Desember. Pada bulan September NTUP Tanaman Pangan mengalami peningkatan tertinggi hingga 2,76 persen, sementara NTUP secara umum justru menurun dibandingkan

bulan sebelumnya. Hal ini karena pengaruh dari penurunan NTP maupun NTUP yang signifikan pada bulan September di 4 subsektor selain tanaman pangan yaitu subsektor tanaman perkebunan rakyat, hortikultura, peternakan dan perikanan.

Gambar 15. Persentase Perubahan NTUP Umum dan NTUP Tanaman Pangan per Bulan di Jawa Barat, 2017

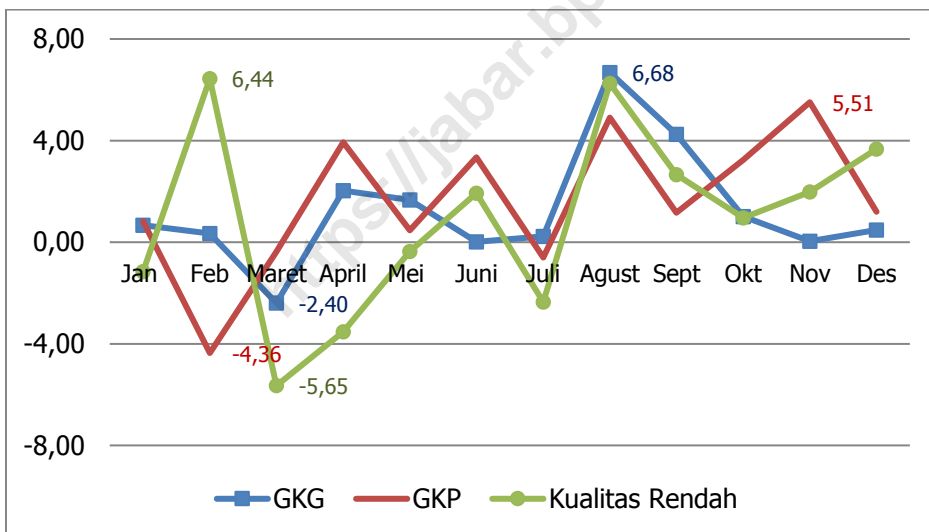


Secara umum, karena NTP dan NTUP dihitung dengan membandingkan 2 indeks (Indeks Diterima dan Indeks Dibayar Petani) maka indeks yang dihasilkan mengandung pengertian bahwa jika indeks kurang dari 100 (<100) berarti petani mengalami penurunan dalam perdagangan karena tingkat harga yang harus dibayar naik lebih cepat dibandingkan yang diterima. Sebaliknya, bila indeks lebih dari 100 (>100) berarti petani mengalami kenaikan dalam perdagangan. Indeks sama dengan 100 (=100) berarti petani tidak mengalami penurunan atau peningkatan dalam hal perdagangan, karena perubahan harga yang diterima oleh petani sama dengan perubahan harga yang dibayar oleh petani terhadap tahun dasar.

## 7. HARGA-HARGA

Beras merupakan makanan utama dari sebagian besar penduduk sehingga menjadi sangat penting bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras. Harga beras selama semester 2 pada tahun 2017 menunjukkan *trend* merambat naik. Bahkan pada awal tahun 2018 kenaikan harga beras di Kota Bandung menunjukkan angka tertinggi di Jawa Barat dan di atas ambang batas normal sebesar 18 persen (<http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2018/02/01/harga-beras-kontribusi-tertinggi-inflasi-januari-2018-418662>).

Gambar 16. Persentase Perubahan Rata-rata Harga Gabah per bulan di Tingkat Petani Menurut Kualitas di Jawa Barat, 2017

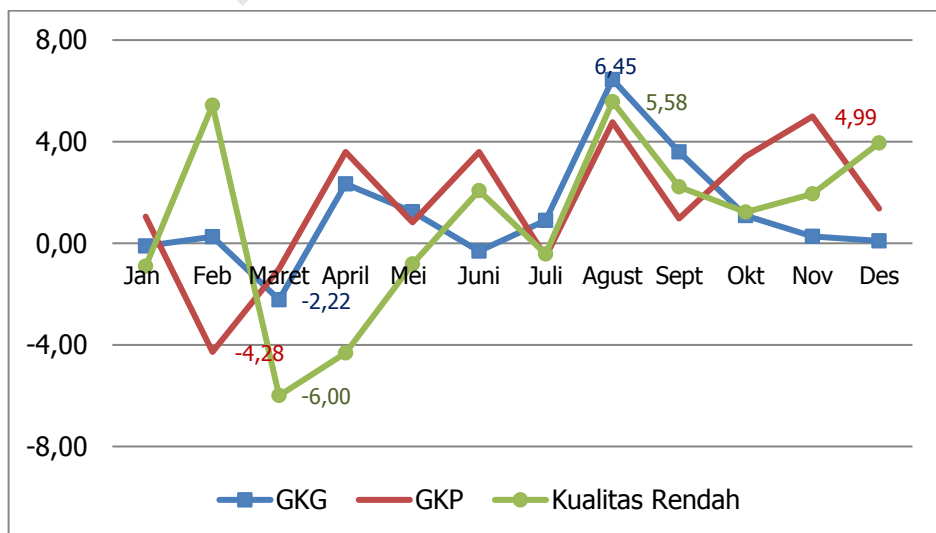


Harga gabah di tingkat petani tahun 2017 meliputi harga Gabah Kering Panen (GKP), Gabah Kering Giling (GKG) dan Gabah Kualitas Rendah. GKP merupakan gabah dengan kadar air antara 14,01-25,00 persen dan kadar hampa/kotoran antara 3,01-10,00 persen. Sedangkan GKG adalah gabah yang mengandung kadar air  $\leq 14,00$  persen dan kadar hampa/kotoran  $\leq 3,00$  persen. Gabah dengan kadar air  $> 25,00$

persen dan kadar hampa/kotoran > 10,00 persen termasuk dalam jenis gabah kualitas rendah ( di luar kualitas).

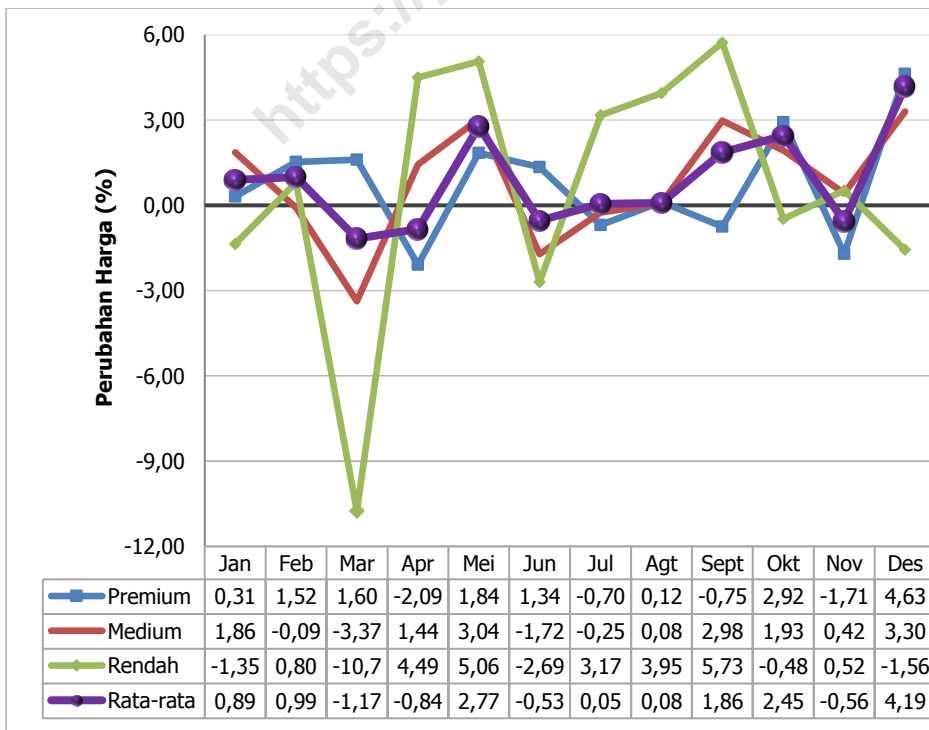
Kenaikan harga gabah tertinggi di tingkat petani untuk GKP, GKG dan gabah kualitas rendah masing-masing sebesar 5,51 persen (November), 6,68 persen (Agustus) dan 6,44 persen (Februari). Harga GKP per Kg tertinggi selama tahun 2017 Rp. 5.297,90 pada bulan Desember dan terendah Rp. 4.223,06 pada bulan Maret dengan rata-rata harga Rp. 4.652,59. Harga tertinggi GKG di tingkat petani per Kg Rp. 5.702,84 pada bulan Desember dan terendah Rp. 4.856,67 pada bulan Maret dengan rata-rata harga tahun 2017 sebesar Rp. 5.244,06. Sedangkan *range* harga untuk gabah kualitas rendah antara Rp. 3.605,33 (Juli) sampai Rp 4.198,05 (Desember) dengan rata-rata harga Rp. 3.837,58 (Lampiran Tabel 3). Pada Gambar 16 dapat dilihat bahwa harga gabah kualitas rendah di tingkat petani naik signifikan pada bulan Februari namun menurun tajam pada bulan berikutnya.

Gambar 17. Persentase Perubahan Rata-rata Harga Gabah per bulan di Tingkat Penggilingan Menurut Kualitas di Jawa Barat, 2017



Fluktuasi perubahan harga gabah per bulan di tingkat penggilingan tahun 2017 menunjukkan pola yang sama dengan harga di tingkat petani. Kenaikan harga tertinggi GKP pada bulan November sebesar 4,99 persen dan GKG pada bulan Agustus sebesar 6,45 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Di tingkat penggilingan, harga GKP tertinggi selama tahun 2017 Rp. 5.413,82 (Desember) dan terendah Rp. 4.320,10 (Maret) dengan rata-rata harga Rp. 4.765,37 per Kg. Harga tertinggi GKG Rp. 5.802,84 dan terendah Rp. 4.976,67 dengan rata-rata harga tahun 2017 sebesar Rp. 5.361,70 per Kg. *Range* harga untuk gabah kualitas rendah per Kg antara Rp 4.376,00 sampai Rp. 3.718,63 dengan rata-rata harga Rp. 3.989,04. *Range* dan rata-rata harga gabah di tingkat penggilingan lebih tinggi dibandingkan di tingkat petani.

Gambar 18. Persentase Perubahan Harga Beras per Bulan di Tingkat Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas Beras di Jawa Barat, 2017



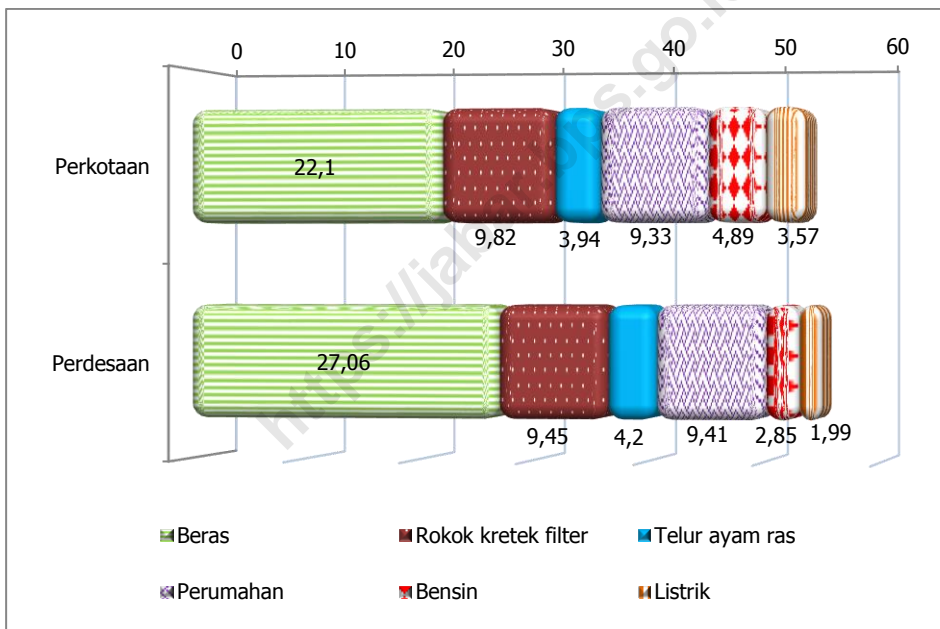
Beras di tingkat penggilingan dikategorikan dalam 3 jenis kualitas beras yaitu beras kualitas Premium, kualitas Medium dan kualitas Rendah. Berdasarkan Permentan No.31 Tahun 2017, beras kualitas Premium adalah beras dengan kandungan maksimum beras patah (*broken*) sampai dengan 15,00 persen. Beras kualitas Medium mengandung beras patah (*broken*) antara 15,01 hingga 25,00 persen. Beras dengan kandungan beras patah (*broken*) di atas 25,00 persen dikategorikan sebagai beras kualitas Rendah.

Rata-rata perubahan harga beras per bulan di tingkat penggilingan tahun 2017 berkisar antara penurunan -1,17 persen hingga kenaikan 4,19 persen. Secara rata-rata, kenaikan harga beras tertinggi terjadi di akhir tahun yakni di bulan Desember setelah terjadi penurunan harga pada bulan sebelumnya. Menurut masing-masing kualitas, *trend* perubahan harga beras kualitas rendah lebih fluktuatif dibandingkan beras Premium maupun Medium.

## 8. POLA KONSUMSI

Data mengenai pola konsumsi penduduk dikumpulkan dan diolah BPS dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang sejak tahun 2015 dilaksanakan dua kali dalam setahun (sebelumnya triwulanan). Data pola konsumsi penduduk Jawa Barat menggambarkan alokasi pengeluaran konsumsi rumah tangga di daerah Jawa Barat.

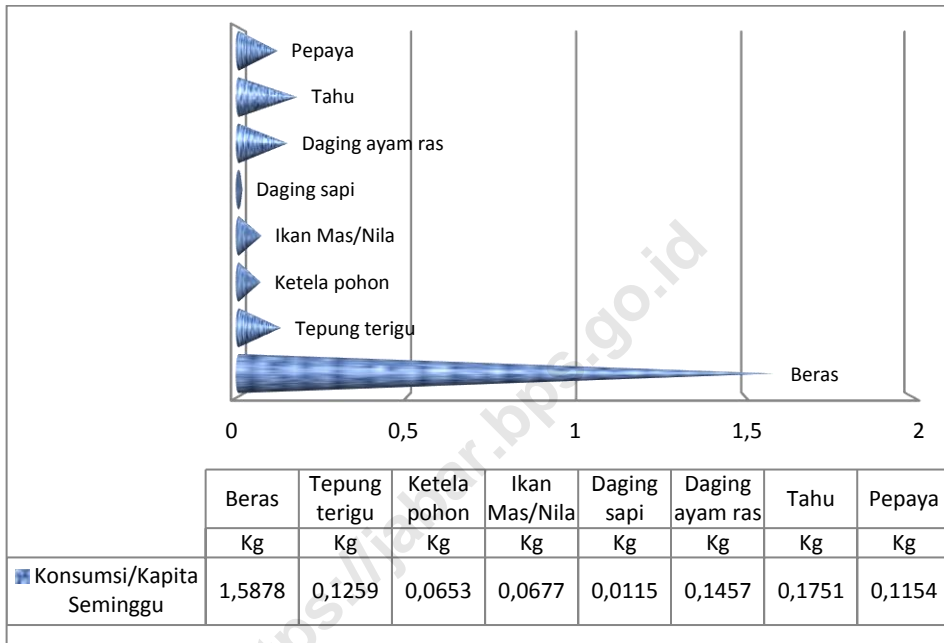
Gambar 19. *Share* Komoditi Makanan dan Non Makanan pada Garis Kemiskinan Menurut Klasifikasi Daerah di Jawa Barat, September 2017 (Persen)



Pola konsumsi penduduk juga dapat menjadi alat ukur dan indikator berkaitan dengan tingkat kemiskinan. Dalam pengukuran tingkat kemiskinan penduduk, beras sebagai makanan pokok yang dikonsumsi oleh seluruh kalangan masyarakat memiliki kontribusi yang besar dalam penentuan garis kemiskinan penduduk. Di urutan pertama komoditi yang menjadi penyumbang terbesar Garis Kemiskinan pada September 2017 untuk perkotaan maupun perdesaan adalah beras.

Share komoditi beras dalam garis kemiskinan perkotaan sebesar 22,10 persen, sedangkan di perdesaan mencapai 27,06 persen.

Gambar 20. Rata-rata Konsumsi Penduduk per Kapita Seminggu Menurut Beberapa Bahan Makanan di Jawa Barat, 2017



Konsumsi beberapa bahan makanan diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2017 dari kelompok makanan dengan konsumsi terbanyak. Data ini belum menunjukkan besarnya konsumsi yang sesungguhnya, karena hanya menggambarkan konsumsi makanan yang dimasak atau disiapkan oleh rumah tangga. Konsumsi dalam bentuk makanan jadi belum termasuk di sini. Tahun 2017, rata-rata konsumsi untuk beras sebagai makanan pokok di Jawa Barat sebanyak 1,59 kg/kapita/minggu. Bila dihitung rata-rata per hari, konsumsi beras penduduk Jawa Barat adalah 0,23 kg/kapita. Tentunya penghitungan rata-rata ini konsumsi beras ini merupakan yang tertinggi dibandingkan konsumsi bahan makanan lainnya.





Pemerintah menyelenggarakan program bantuan pangan bersyarat berupa penjualan beras di bawah harga pasar dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. BULOG sebagai lembaga negara yang bergerak di bidang logistik pangan memiliki beberapa tugas publik, salah satunya menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang diwujudkan dalam pelaksanaan program Raskin, atau dalam istilah baru disebut Rastra (Beras Sejahtera). Menurut data BPS hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan September 2017, persentase rumah tangga penerima raskin di Jawa Barat sekitar 42 persen.

<https://jabar.bps.go.id>

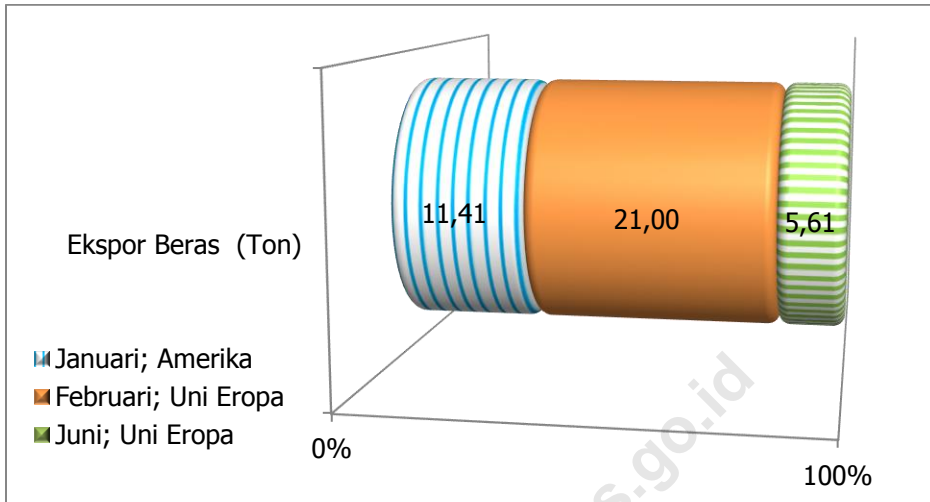
## 9. EKSPOR IMPOR

Dalam perdagangan internasional, komoditi beras memiliki kode HS (*Harmonized System Code/ HS Code*) dengan kode 4 digit pertama 1006. HS merupakan bahasa *numeric* untuk klasifikasi produk atau bahan produk sebagai standar internasional untuk pelaporan barang di bea cukai dan instansi pemerintah. Di Indonesia sistem penggolongan HS menggunakan sistem penomoran 10 digit. Berdasarkan kode ini didapatkan informasi mengenai detail komoditi/barang yang diekspor maupun diimpor.

Ekspor Indonesia tahun 2017 didominasi oleh sektor non migas sebesar 90,67 persen dengan ekspor di sektor pertanian sebesar 2,18 persen. Tiga provinsi yang memberikan sumbangan terbesar terhadap ekspor nasional pada periode Januari - Desember tahun 2017 adalah Jawa Barat US\$29.178,3 juta (17,29 persen), Jawa Timur US\$18.428,0 juta (10,92 persen), dan Kalimantan Timur US\$17.633,8 juta (10,45 persen). Kontribusi ekspor dari ketiga provinsi ini mencapai 38,66 persen.

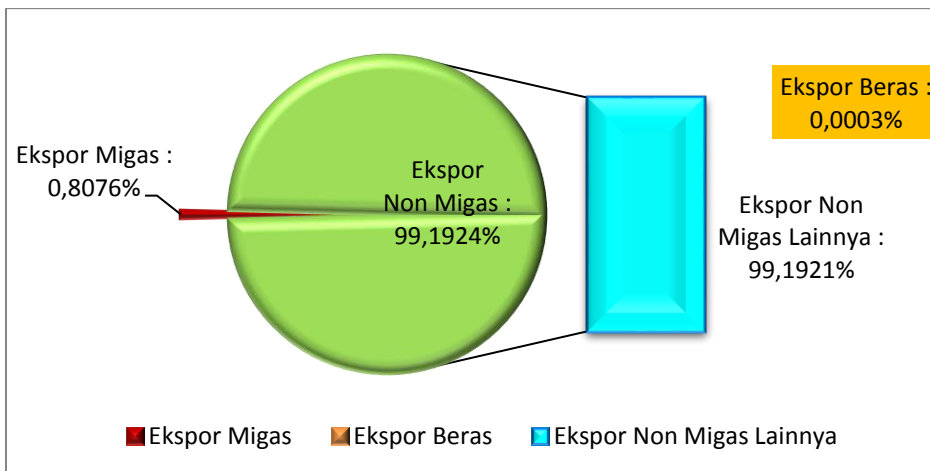
Berdasarkan data ekspor-impor Provinsi Jawa Barat selama bulan Januari sampai dengan Desember 2017, komoditi beras yang diekspor ke luar negeri adalah jenis beras khusus (jenis lainnya dari ketan). Selama tahun 2017, ekspor beras dari Jawa Barat tercatat hanya terjadi pada bulan Januari, Februari dan Juni dengan negara tujuan ekspor Amerika dan Uni Eropa. Total volume ekspor beras Jawa Barat tahun 2017 sebanyak 38,02 Ton di mana ekspor beras terbesar pada bulan Februari yaitu 21,00 Ton.

Gambar 21. Volume Ekspor Beras Jawa Barat Menurut Bulan dan Negara Tujuan Ekspor Selama Tahun 2017 (Ton)

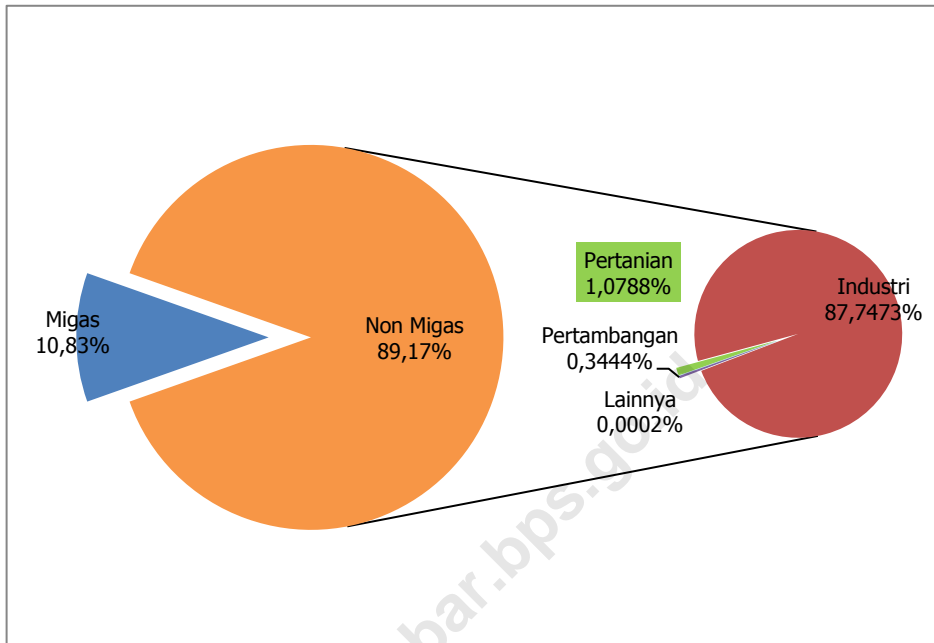


Ekspor Jawa Barat tahun 2017 senilai 29.179,18 Juta USD didominasi oleh nilai ekspor non migas (99,19 persen), sementara nilai ekspor migas kurang dari satu persen. Nilai ekspor komoditi beras tahun 2017 sebesar 83.284 USD atau hanya 0,0003 persen dari total nilai ekspor non migas Jawa Barat.

Gambar 22. Persentase Nilai Ekspor Migas - Non Migas dan Ekspor Beras Jawa Barat, 2017



Gambar 23. Persentase Nilai Impor Migas dan Non Migas Jawa Barat, 2017



Nilai impor Jawa Barat tahun 2017 mencapai 11.816,84 Juta USD, meliputi impor migas sebesar 1.279,67 Juta USD dan Impor non migas sebesar 10.537,17 Juta USD. Total impor non migas didominasi oleh sektor industri. Nilai impor untuk sektor pertanian sebesar 127,48 Juta USD, namun tidak terdapat impor khusus komoditi beras. Bukan berarti tidak ada distribusi maupun konsumsi beras impor di Jawa Barat, mengingat di provinsi ini merupakan pusat berbagai jenis kuliner baik dalam maupun luar negeri. Kebutuhan akan beras impor dimungkinkan berasal dari importir di luar wilayah Jawa Barat.

## 10. PENUTUP

Luas wilayah Provinsi Jawa Barat secara nasional berada di urutan 20 dengan jumlah penduduk terbanyak dibandingkan provinsi lainnya. Laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat lima tahun terakhir menunjukkan *trend* yang menurun, namun secara kuantitas tentunya jumlah penduduk terus bertambah setiap tahun. Berkaitan dengan jumlah penduduk, masalah ketersediaan pangan menjadi hal yang harus diantisipasi pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pokok penduduk.

Kondisi pangan Jawa Barat selama tahun 2017 cenderung mengalami peningkatan dan perbaikan meskipun pada akhir tahun terjadi gejolak harga terutama pada komoditi beras. Menurut Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2017 Jawa Barat masih menjadi kontributor terbesar dalam pencapaian swasembada pangan nasional dan penyedia stok beras nasional. Potensi pangan terbesar khususnya pangan pokok yaitu beras berada di kawasan Jawa Barat bagian utara dengan sebanyak 80 persen sawah basah di daerah tersebut ([www.jabarprov.go.id](http://www.jabarprov.go.id)).

Luas panen tanaman padi dua tahun terakhir mengalami peningkatan. Meskipun produktivitas padi sedikit mengalami penurunan, produksi padi mengalami peningkatan karena bertambahnya luas panen yang cukup signifikan. Produksi padi pada tahun 2016 mencapai lebih dari 12 juta ton dan tidak menurun pada tahun 2017. Tahun 2017, NTP dan NTUP sektor tanaman pangan menunjukkan *trend* meningkat, namun secara rata-rata NTP tanaman pangan 2017 masih dibawah 100 yakni 99,12. Hal ini berarti kesejahteraan petani masih membutuhkan perhatian yang lebih untuk ditingkatkan.

Inflasi gabungan 7 kota di Jawa Barat untuk Komoditi Beras menunjukkan gejolak yang signifikan di semester akhir 2017. Gejolak harga beras masih terus terjadi hingga memasuki tahun 2018. Andil

inflasi komoditi Beras cukup tinggi pada inflasi/deflasi umum Jawa Barat pada September-Desember 2017. Sepanjang 2017, harga beras di penggilingan secara rata-rata untuk seluruh kualitas beras berkisar antara Rp. 9.377 hingga Rp. 10.379. Harga beras mencapai angka tertinggi pada bulan Desember dan penurunan rata-rata harga beras tertinggi terjadi di bulan Maret. Selaras dengan penurunan harga gabah kering panen dan kualitas rendah pada bulan Maret 2017, beras kualitas medium dan rendah mengalami penurunan harga yang cukup signifikan.

Berdasarkan data Susenas 2017, beras sebagai makanan pokok menjadi bahan makanan yang paling banyak dikonsumsi penduduk Jawa Barat. Konsumsi beras sebesar 1,59 kg per kapita seminggu atau kurang lebih 0,23 kg per kapita per hari. Angka ini masih terhitung kasar karena belum mencakup konsumsi beras yang diolah di luar rumah tangga. Sebagai gambaran perkiraan kebutuhan beras masyarakat, dapat kita gunakan angka rata-rata konsumsi beras nasional 2017 yaitu 111,58 kg/kapita/tahun. Sehingga, Jawa Barat dengan jumlah penduduk 48,04 juta membutuhkan beras sebanyak 5,36 juta ton setahun untuk dikonsumsi. Total produksi padi Jawa Barat lebih dari 12 juta ton, bila dikonversikan setara 7,8 juta ton beras. Sehingga dapat disimpulkan bahwa produksi beras Jawa Barat mencukupi bahkan surplus 2,4 juta ton untuk memenuhi kebutuhan rata-rata konsumsi penduduknya.

Surplus produksi beras, selain digunakan sebagai stok atau cadangan pangan juga diekspor ke luar negeri. Pada tahun 2017 ekspor beras Jawa Barat sebanyak 38,02 ton dengan negara tujuan Amerika dan Uni Eropa. Sementara untuk impor, tidak ada catatan kegiatan impor komoditi beras secara langsung di Provinsi Jawa Barat. Kebutuhan beras impor untuk jenis makanan/kuliner khusus dimungkinkan didapatkan dari importir di luar Jawa Barat.

Tantangan pembangunan ke depan khususnya di bidang pertanian dan pangan di Jawa Barat adalah mempertahankan dan meningkatkan produksi pangan. Sejauh ini Jawa Barat secara regional telah mampu mencukupi kebutuhan logistik pangan (beras) dan memiliki cadangan pangan karena surplus produksi. Hal lainnya yang perlu mendapat perhatian pemerintah adalah kesejahteraan petani sebagai produsen dan pengendalian distribusi serta harga (gabah maupun beras). Diperlukan kerjasama dari berbagai pihak baik pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan.

## LAMPIRAN

<https://jabar.bps.go.id>





Tabel 1. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2017

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )	Laju Pertumbuhan Penduduk 2016-2017 (persen)
Bogor	2710,62	5715009	2108	2,28
Sukabumi	4145,70	2453498	592	0,36
Cianjur	3840,16	2256589	588	0,25
Bandung	1767,96	3657601	2069	1,70
Garut	3074,07	2588839	842	0,75
Tasikmalaya	2551,19	1747318	685	0,29
Ciamis	1414,71	1181981	835	0,56
Kuningan	1110,56	1068201	962	0,59
Cirebon	984,52	2159577	2194	0,77
Majalengka	1204,24	1193725	991	0,48
Sumedang	1518,33	1146435	755	0,38
Indramayu	2040,11	1709994	838	0,54
Subang	1893,95	1562509	825	1,07
Purwakarta	825,74	943337	1142	1,14
Karawang	1652,20	2316489	1402	0,90
Bekasi	1224,88	3500023	2857	3,81
Bandung Barat	1305,77	1666510	1276	1,10
Pangandaran	1010,00	395098	391	0,58
Kota Bogor	118,50	1081009	9122	1,53
Kota Sukabumi	48,25	323788	6711	0,84
Kota Bandung	167,67	2497938	14898	0,29
Kota Cirebon	37,36	313325	8387	0,91
Kota Bekasi	206,61	2859630	13841	2,60
Kota Depok	200,29	2254513	11256	3,43
Kota Cimahi	39,27	601099	15307	1,19
Kota Tasikmalaya	171,61	661404	3854	0,27
Kota Banjar	113,49	182388	1607	0,27
Jawa Barat	35377,76	48037827	1358	1,39

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2017

Tabel 2. NTP dan NTUP Umum (Gabungan Lima Sektor) dan Sektor Tanaman Pangan Menurut Bulan di Jawa Barat, 2017

Bulan	NTP		NTUP	
	Umum	Tanaman Pangan	Umum	Tanaman Pangan
Januari	103,25	97,63	112,83	105,05
Februari	102,53	95,85	112,18	103,16
Maret	102,37	95,32	111,98	102,47
April	102,87	95,84	112,27	102,82
Mei	103,94	97,03	113,73	104,36
Juni	104,46	97,23	114,54	104,81
Juli	104,48	97,14	114,58	104,76
Agustus	105,37	98,28	115,54	105,98
September	105,98	100,58	115,73	107,77
Oktober	107,36	103,50	117,16	110,74
November	108,02	105,16	117,86	112,52
Desember	108,39	105,83	118,59	113,58
Rata-rata	104,92	99,12	114,75	106,50

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Tabel 3. Harga Gabah di Tingkat Petani per Bulan Menurut Kualitas Gabah di Jawa Barat, 2017 (Rupiah/Kg)

Bulan	GKG	GKP	Kualitas Rendah
Januari	4.958,82	4.432,33	3.752,32
Februari	4.975,86	4.238,99	3.993,90
Maret	4.856,67	4.223,06	3.768,33
April	4.955,17	4.388,91	3.635,26
Mei	5.037,88	4.409,45	36.22,25
Juni	5.038,57	4.556,57	3.692,31
Juli	5.050,00	4.528,95	3.605,33
Agustus	5.387,50	4.751,17	3.830,58
September	5.616,67	4.806,26	3.932,73
Oktober	5.673,35	4.962,05	3.970,63
November	5.675,42	5.235,40	4.049,33
Desember	5.702,84	5.297,90	4.198,05
Rata-rata	5.244,06	4.652,59	3.837,58

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Tabel 4. Harga Gabah di Tingkat Penggilingan per Bulan Menurut Kualitas Gabah di Jawa Barat, 2017 (Rupiah/Kg)

Bulan	GKG	GKP	Kualitas Rendah
Januari	5.076,47	4.558,58	3.953,37
Februari	5.089,66	4.363,62	4.168,25
Maret	4.976,67	4.320,10	3.918,33
April	5.093,10	4.475,59	3.749,10
Mei	5.156,06	4.512,24	3.718,63
Juni	5.140,00	4.674,50	3.795,85
Juli	5.186,36	4.649,21	3.779,67
Agustus	5.520,83	4.871,14	3.990,58
September	5.719,44	4.918,55	4.079,43
Oktober	5.781,49	5.086,54	4.129,52
November	5.797,46	5.340,54	4.209,75
Desember	5.802,84	5.413,82	4.376,00
Rata-rata	5.361,70	4.765,37	3.989,04

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Tabel 5. Harga Beras di Tingkat Penggilingan per Bulan Menurut Kualitas Beras di Jawa Barat, 2017 (Rupiah/Kg)

Bulan	Kualitas Beras			
	Premium	Medium	Rendah	Rata-rata
Januari	9.787	9.342	8.829	9.474
Februari	9.936	9.334	89.00	95.68
Maret	10.095	9.019	7.943	9.456
April	9.884	9.149	8.300	9.377
Mei	10.066	9.427	8.720	9.637
Juni	10.201	9.265	8.485	9.586
Juli	10.130	9.242	8.754	9.591
Agustus	10.142	9.249	9.100	9.599
September	10.066	9.525	9.621	9.778
Oktober	10.360	9.709	9.575	10.018
November	10.183	9.750	9.625	9.962
Desember	10.654	10.072	9.475	10.379

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Tabel 6. Luas Panen Padi (Sawah dan Bukan Sawah) Menurut Sub-Round (SR) dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2016 (Hektar)

Kabupaten/Kota	SR-1 Jan-Apr	SR-2 Mei-Ags	SR-3 Sep-Des	Total Jan-Des
Bogor	34.860	35.046	22.063	91.969
Sukabumi	85.029	54.473	30.353	169.855
Cianjur	73.151	54.454	37.847	165.451
Bandung	36.144	25.664	28.524	90.331
Garut	72.654	49.511	33.702	155.868
Tasikmalaya	47.544	44.966	45.151	137.661
Ciamis	30.963	23.433	22.033	76.428
Kuningan	23.380	24.343	13.153	60.877
Cirebon	22.351	39.122	27.651	89.124
Majalengka	47.318	45.949	18.454	111.721
Sumedang	29.493	26.912	18.955	75.360
Indramayu	67.797	89.721	78.425	235.943
Subang	55.117	57.643	63.776	176.535
Purwakarta	17.592	16.529	8.549	42.669
Karawang	34.609	70.550	83.221	188.380
Bekasi	17.592	43.276	33.916	94.784
Bandung Barat	20.558	16.941	12.048	49.547
Pangandaran	15.476	13.963	2.244	31.683
Kota Bogor	286	274	235	794
Kota Sukabumi	1.252	1.301	1.268	3.822
Kota Bandung	236	341	581	1.158
Kota Cirebon	156	227	95	477
Kota Bekasi	56	388	283	726
Kota Depok	94	69	78	241
Kota Cimahi	108	57	121	286
Kota Tasikmalaya	5.147	5.140	4.401	14.688
Kota Banjar	2.686	1.278	2.780	6.744
Jawa Barat	741.647	741.569	589.905	2.073.122

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, ATAP

Tabel 7. Luas Tanam Padi (Sawah dan Bukan Sawah) Menurut Sub-Round (SR) dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, 2016 (Hektar)

Kabupaten/Kota	SR-1 Jan-Apr	SR-2 Mei-Ags	SR-3 Sep-Des	Total Jan-Des
Bogor	33.401	26.930	31.351	91.682
Sukabumi	61.563	33.167	77.972	172.702
Cianjur	54.632	31.274	75.987	161.892
Bandung	30.099	21.046	38.052	89.196
Garut	52.112	37.452	64.925	154.490
Tasikmalaya	47.304	41.741	51.441	140.486
Ciamis	23.275	32.585	32.576	88.436
Kuningan	25.979	17.043	25.122	68.144
Cirebon	43.824	36.975	29.617	110.416
Majalengka	40.847	33.635	50.514	124.997
Sumedang	26.270	21.803	28.976	77.049
Indramayu	113.425	99.081	95.929	308.435
Subang	71.670	75.643	52.265	199.578
Purwakarta	17.877	10.538	16.463	44.878
Karawang	82.640	66.471	64.083	213.194
Bekasi	43.757	22.310	34.360	100.427
Bandung Barat	18.177	12.251	20.830	51.257
Pangandaran	9.785	14.867	15.655	40.307
Kota Bogor	268	183	345	795
Kota Sukabumi	1.184	1.288	1.394	3.865
Kota Bandung	338	537	671	1.546
Kota Cirebon	254	165	184	603
Kota Bekasi	420	304	91	814
Kota Depok	55	78	86	219
Kota Cimahi	88	89	122	299
Kota Tasikmalaya	4.081	5.212	5.418	14.712
Kota Banjar	1.881	2.983	2.983	7.847
Jawa Barat	805.207	645.649	817.410	2.268.265

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, ATAP



Tabel 8. Luas Panen (Hektar), Produktivitas Padi (Ku/Ha) dan Produksi Padi dan Beras (Ton) di Jawa Barat, 2012-2016

Komoditi	2012	2013	2014	2015	2016
Luas Panen Padi (Ha)	1.918.799	2.029.891	1.979.799	1.857.612	2.073.202
Produktivitas Padi (Ku/Ha)	58,74	59,53	58,82	61,22	60,49
Produksi Padi (Ton)	11.271.861	12.083.162	11.644.899	11.373.144	12.540.550
Produksi Beras (Ton)	7.071.965	7.580.975	7.306.010	7.135.511	7.867.941

Catatan: Konversi GKP ke GKG = 86,02 persen, Konversi GKG ke Beras = 62,74

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan BPS Provinsi Jawa Barat

Tabel 9. Produksi Beras (Padi Sawah dan Ladang) Jawa Barat, 2007-2017

PADI	Produksi Setara Beras (ton)			
	Sub Round I	Sub Round II	Sub Round III	Setahun
2007	2.116.668,49	2.632.183,30	1.516.808,22	6.265.660,01
2008	2.893.275,78	2.320.521,98	1.176.397,85	6.390.195,61
2009	3.007.077,38	2.728.193,69	1.368.578,99	7.103.850,06
2010	3.059.602,65	2.586.077,35	1.718.157,55	7.363.837,55
2011	3.207.638,18	2.481.455,91	1.610.008,72	7.299.102,80
2012	3.121.527,43	2.528.933,37	1.421.504,11	7.071.965,32
2013	3.190.083,33	2.597.744,67	1.793.148,08	7.580.975,46
2014	2.804.666,04	2.569.410,75	1.931.933,04	7.306.009,83
2015	3.053.245,24	2.512.883,81	1.569.381,50	7.135.510,55
2016	2.843.089,45	2.772.142,43	2.252.709,19	7.867.941,07
Aram 1 2017	2.995.496,83	2.776.620,19	2.168.811,38	7.940.928,39
Aram 2 2017	2.998.480,12	2.818.344,79	2.036.802,65	7.853.627,57

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, ATAP

Tabel 10. Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Padi Jawa Barat Menurut Subround, 2007 - 2017

Tahun	Sub Round 1 (Januari-April)			Sub Round 2 (Mei-Agustus)		
	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
2007	640.201	52,31	3.349.159	764.427	86,21	4.164.847
2008	844.127	54,23	4.577.968	642.545	89,02	3.671.712
2009	862.275	55,58	4.792.919	735.336	91,84	4.348.412
2010	841.994	57,92	4.876.638	719.921	91,78	4.121.896
2011	881.726	57,98	5.112.589	661.868	101,67	3.955.142
2012	851.921	58,40	4.975.339	699.648	100,35	4.030.815
2013	847.672	59,98	5.084.608	716.610	100,60	4.140.492
2014	771.966	57,91	4.470.300	699.778	101,20	4.095.331
2015	797.112	58,24	4.866.505	670.880	103,06	4.005.234
2016	741.647	61,05	4.531.542	741.568	107,31	4.418.461

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan BPS Provinsi Jawa Barat

Tabel 10. Lanjutan

Tahun	Sub Round 3 (Sept-Des)			Januari-Desember		
	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
2007	424.457	56,54	2.400.013	1.829.085	54,20	9.914.019
2008	316.956	58,73	1.861.389	1.803.628	56,06	10.111.069
2009	352.592	61,87	2.181.350	1.950.203	58,06	11.322.681
2010	475.742	57,56	2.738.536	2.037.657	57,60	11.737.070
2011	420.872	60,97	2.566.160	1.964.466	59,22	11.633.890
2012	367.230	61,70	2.265.706	1.918.799	58,74	11.271.861
2013	465.609	61,38	2.858.062	2.029.891	59,53	12.083.161
2014	508.055	60,61	3.079.268	1.979.799	58,82	11.644.899
2015	389.620	58,31	2.501.405	1.857.612	61,22	11.373.144
2016	589.986	64,20	3.590.547	2.073.201	60,49	12.540.550

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan BPS Provinsi Jawa Barat

Tabel 11. Produksi Padi dan Persentase Produksi Menurut Kabupaten/ Kota di Jawa Barat, 2016

Kabupaten/Kota	Produksi Padi (Ton)	Persentase (%)
Bogor	556.808,03	4,44
Sukabumi	1.027.455,31	8,19
Cianjur	1.000.814,91	7,98
Bandung	546.414,64	4,36
Garut	942.843,72	7,52
Tasikmalaya	832.713,20	6,64
Ciamis	462.314,18	3,69
Kuningan	368.241,95	2,94
Cirebon	539.112,29	4,30
Majalengka	675.800,93	5,39
Sumedang	455.852,64	3,63
Indramayu	1.427.218,60	11,38
Subang	1.067.862,63	8,52
Purwakarta	258.102,97	2,06
Karawang	1.139.511,83	9,09
Bekasi	573.347,81	4,57
Bandung Barat	299.706,78	2,39
Pangandaran	191.651,07	1,53
Kota Bogor	4.804,12	0,04
Kota Sukabumi	23.116,25	0,18
Kota Bandung	7.004,14	0,06
Kota Cirebon	2.887,19	0,02
Kota Bekasi	4.390,36	0,04
Kota Depok	1.457,20	0,01
Kota Cimahi	1.728,80	0,01
Kota Tasikmalaya	88.848,32	0,71
Kota Banjar	40.792,04	0,33
Jawa Barat	12.540.801,92	100,00

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan BPS Provinsi Jawa Barat

Tabel 12. Share Komoditi yang Memberikan Kontribusi Terbesar pada Garis Kemiskinan Menurut Klasifikasi Daerah di Jawa Barat, September 2017 (Persen)

	Komoditi	Perkotaan	Komoditi	Perdesaan
<b>Makanan</b>				
1	Beras	22,10	Beras	27,06
2	Rokok kretek filter	9,82	Rokok kretek filter	9,45
3	Daging sapi	4,34	Telur ayam ras	4,20
4	Daging ayam ras	4,17	Daging ayam ras	2,90
5	Telur ayam ras	3,94	Roti	2,62
<b>Non Makanan</b>				
1	Perumahan	9,33	Perumahan	9,41
2	Bensin	4,89	Bensin	2,85
3	Listrik	3,57	Listrik	1,99
4	Pendidikan	2,12	Perlengkapan Mandi	1,21
5	Angkutan	1,26	Pendidikan	1,07

Sumber : Data Susenas 2017, BPS Provinsi Jawa Barat

Tabel 13. Rata-rata Konsumsi Penduduk per Kapita Seminggu Menurut Beberapa Bahan Makanan di Jawa Barat, 2017

Komoditi	Satuan	Konsumsi/Kapita/ Minggu
Beras	Kg	1,5878
Tepung terigu	Kg	0,1259
Ketela pohon	Kg	0,0653
Mas.Nila	Kg	0,0677
Teri diawetkan	Ons	0,1174
Daging sapi	Kg	0,0115
Daging ayam ras	Kg	0,1457
Telur Ayam Ras	Butir	2,4226
Kangkung	Kg	0,0801
Bawang Merah	Ons	0,3953
Tahu	Kg	0,1751
Pepaya	Kg	0,1154
Pisang Ambon	Kg	0,0945
Minyak goreng	Liter	0,2071
Kopi instan (sachet)	20 gram	1,9388
Garam	Gram	16,6789
Mie instan	80 gram	1,2078
Makanan gorengan	Potong	4,8387
Rokok kretek filter	Batang	10,7047

Sumber : Data Susenas 2017, BPS Provinsi Jawa Barat

Tabel 14. Volume dan Nilai Ekspor Komoditi Beras di Jawa Barat Menurut Bulan dan Negara Tujuan, 2017

Bulan	Kode HS	Negara Tujuan	<i>Volume Netto</i> (Kg)	Nilai FOB (US\$)
1	1006309900	UNI EROPA	11.410	30.014
2	1006309900	AMERIKA	21.000	40.320
6	1006309900	UNI EROPA	5.605	12.951
Total			26.605	53.271

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat



Tabel 15. Nilai Ekspor Migas Dan Non Migas serta Komoditi Beras di Jawa Barat, 2017

Ekspor	Nilai Ekspor (US\$)
Migas	235,6641
Non Migas	28943,5154
Nilai Ekspor Beras	0,0833
Non Migas Lainnya	28943,4321
Total Ekspor	29179,1795

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

## DAFTAR ISTILAH

Dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang dimaksud dengan:

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.

Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.

Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.

Swasembada pangan adalah keadaan dimana suatu negara dapat memenuhi tingkat permintaan akan suatu bahan pangan sendiri tanpa perlu melakukan impor dari pihak luar. Swasembada pangan juga merupakan keadaan terhindarnya suatu negara dari kelaparan.

<https://jabar.bps.go.id>

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA

<https://jabar.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. PHH. Mustofa No. 43 Bandung 40124, Jawa Barat  
Telp.: 022 7272595; 022 7201696; Faks.: 022 7213572  
E-Mail: [bps3200@bps.go.id](mailto:bps3200@bps.go.id)  
Website: <http://jabar.bps.go.id>